



INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

RENCANA KERJA TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan "RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI TAHUN 2021". Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Inspektorat Kota Cimahi.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan hal penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Output dan anggaran kegiatan dalam Renja disesuaikan dengan kebutuhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami mengharapkan semoga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat Kota Cimahi.

Cimahi, Februari 2021



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650921 1990102 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>vi</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>vi</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat	5
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja gaji dan tunjangan.....	5
b. Belanja tambahan penghasilan PNS.....	6
c. Belanja Tunjangan Transportasi ASN	6
2. Belanja Langsung	
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.....	6
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7
3) Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan.....	7
4) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.....	7
5) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	8
6) Kegiatan Penyediaan Gudang Kantor	8
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	8
8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	9
9) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	9
10) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	10
11) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas	10

b. Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi	
1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Evaluasi LKIP	10
2) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Reviu LKPD	10
3) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemeriksaan Reguler	11
4) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemeriksaan Tertentu	11
5) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	11
6) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pencegahan Korupsi Terintegrasi	12
7) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	12
8) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	12
9) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)	13
10)Kegiatan Penyelenggaraan maturitas SPIP	13
11)Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala Pranata Pengawasan	13
12)Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	14
13)Kegiatan Keterampilan dan Profesionalisme	14
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1) Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	14
2) Kegiatan Penyusunan Laporan Inventaris Barang	15
B. Analisis Kinerja	22
C. Capaian Renstra Tahun 2012 – 2017	28
D. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

A. Tujuan	33
B. Sasaran	34

C. Strategi Pencapaian Sasaran	
1. Kebijakan	34
2. Program	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
A. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Rencana	
1. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2020.....	37
2. Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi	38
B. Rencana Kegiatan Tahun Rencana	
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan	
1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	46
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	47
2) Pendampingan dan Asistensi	49
BAB V	PENUTUP
	51

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 2.1. Perbandingan anggaran realisasi BTL dengan BL Tahun 2020	5
Tabel 2.2. Rekapitulasi alokasi dan realisasi BTL dan BL Tahun 2020	16
Tabel 2.3. Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2012-2017	29
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Inspektorat Kota Cimahi	34
Tabel 3.2. Visi – Misi – Tujuan RPJMD – Sasaran RPJMD – Strategi RPJMD	35

DAFTAR GRAFIK

	<i>Hal</i>
Grafik 1 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Cimahi tahun 2020	19
Grafik 2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020	19
Grafik 3 Persentase Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Cimahi tahun 2020	20
Grafik 4 Persentase Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, secara normatif telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Dari KKN, yang antara lain meliputi asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas KKN, adalah melalui peranan lembaga pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan rencana kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan implementasi tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi. Tata cara mengenai penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, kebutuhan dana/pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju. Renja akan menjadi bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun anggaran 2021 berdasarkan acuan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022.

B. Landasan Hukum

Inspektorat Kota Cimahi adalah unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Kota Cimahi secara hierarkis berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207),
 22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

C. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan implementasi Renstra Tahun 2017-2022 yang menjadi pedoman bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun. Berdasarkan pertimbangan ini maka maksud dan tujuan Renja Tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2017-2022 Inspektorat Kota Cimahi serta tabel 7.2 dan 8.2 RPJMD Perubahan tahun 2021-2022 yaitu :

- a. Menyediakan acuan resmi dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun.
- b. Memudahkan dalam mencapai tujuan dan target kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan.
- c. Memudahkan, memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Mengemukakan Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020**
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan realisasi Renstra serta capaian kinerja Inspektorat Tahun 2020, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, serta hambatan dan solusinya.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT**
Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran Renja Inspektorat serta penjelasan tentang strategi pencapaian sasaran Inspektorat Tahun 2021.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT**
Memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun rencana dan rencana kegiatan tahun rencana tahun 2021.
- BAB V : PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 maka dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perbandingan anggaran dan realisasi untuk belanja tidak langsung dengan belanja langsung dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL)
Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	% Realisasi
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	6.256.371.748	5.992.076.513	264.295.235	95,77
B	Belanja Langsung (BL)	1.163.808.045	1.135.359.893	28.448.152	97,56
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	724.228.045	698.314.293	25.913.752	96,42
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.900.000	4.900.000	0	100
3.	Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi	434.680.000	432.145.600	2.534.400	99,42
JUMLAH BTL + BL		7.420.179.793	7.127.436.406	292.743.387	96,05

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar Rp. 7.127.436.406,00 dengan selisih sebesar Rp. 292.743.387,00 dan rata-rata realisasi 96,05 % dengan realisasi fisik sebesar 99,71%. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Capaian target (realisasi) untuk belanja tidak langsung (belanja gaji & tunjangan dan tambahan penghasilan PNS) adalah Rp. 5.992.076.513,00 (95,77%) dari Input kegiatan Rp.6.256.371.748,00.

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

- Capaian Target : Keuangan Rp. 2.129.276.513 (96,86 %) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

- Input kegiatan : Dana Rp. 2.198.246.750,00 SDM 32 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : 12 Bulan.
 - Outcomes Kegiatan : 12 Bulan
- b. Belanja tambahan penghasilan PNS
- Capaian Target : Keuangan Rp. 3.712.800.000,00 (95,74 %) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 3.878.124.998 SDM 32 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : 12 Bulan
 - Outcomes Kegiatan : 12 Bulan
- c. Belanja Tunjangan Transportasi ASN
- Capaian Target : Keuangan Rp. 150.000.000,00 (83,33 %) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 180.000.000,00 SDM 32 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : 12 Bulan.
 - Outcomes Kegiatan : Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai Inspektorat Kota Cimahi.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung memiliki 3 (program) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Capaian target (realisasi) untuk belanja langsung adalah Rp. 1.135.359.893,00 dari input kegiatan Rp. 1.163.808.04,00. Penggunaan anggaran dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari:

1) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Cimahi dalam rangka peningkatan kinerja.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 49.916.000,00 (99,83%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 50.000.000,00 SDM 4 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
- Output kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor.

- Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dilaksanakan untuk memfasilitasi terpenuhinya penyediaan jasa pendukung komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi.
- Capaian Target : Keuangan Rp. 30.345.504,00 (91,96%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 33.000.000,00 SDM 4 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan air
 - Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.
- 3) Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan, dilaksanakan untuk penyediaan keperluan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi, berupa media massa (koran, Majalah, tabloid), barang cetakan dan biaya foto copy dan penjilidan laporan.
- Capaian Target : Keuangan Rp. 25.800.000,00 (98,12%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 26.295.000,00 SDM 4 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah bulan penyediaan media informasi, jumlah bulan penggandaan.
 - Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara
- 4) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dilaksanakan untuk pemeliharaan kendaraan (BBM, pelumas, dan suku cadang), dan pembayaran jasa jaminan barang milik daerah berupa asuransi perlindungan guna mendukung efisiensi dan efektifitas pemeliharaan barang milik daerah.
- Capaian Target : Keuangan Rp. 76.961.100,00 (79,80%) dan fisik 99,92% untuk 3 unit kendaraan (2 unit roda 4, 1 unit roda 2).
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi

- Input kegiatan : Dana Rp. 96.440.000,00 SDM 5 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah kendaraan yang dipelihara, jumlah asuransi kendaraan yang dibayar sebanyak 1 unit roda 4 dan 1 unit roda 3 dengan 1 orang supir.
 - Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara
- 5) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor, ditujukan untuk memfasilitasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor pada Inspektorat Kota Cimahi.
- Capaian Target : Keuangan Rp. 81.498.000,00 (96,85%) dan fisik 97,92%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 84.150.000,00 SDM 4 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor
 - Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.
- 6) Kegiatan Penyediaan Gudang kantor, dilaksanakan untuk memfasilitasi terpenuhinya penyediaan gudang kantor pada Inspektorat Kota Cimahi.
- Capaian Target : Keuangan Rp.49.000.000,- (100%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp.49.000.000,- SDM 4 orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah gudang kantor 1 unit.
 - Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dilaksanakan untuk penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan non PNS.
- Capaian Target : Keuangan Rp. 22.435.644,00 (98,40%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Dana Rp. 22.800.000,00 SDM 10 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.

- Output kegiatan : Jumlah tenaga kerja non PNS
- Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.

8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dilaksanakan dalam rangka penyediaan keperluan makan dan minum, baik untuk pegawai, tamu maupun kegiatan rapat/pertemuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 59.383.000,00 (99,88%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 59.456.000,00 SDM Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
- Output kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
- Outcomes Kegiatan : Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.

9) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan, merupakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Kota Cimahi, serta perjalanan dinas caraka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 44.109.045,00 (99,97%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 44.122.045,00 SDM 40 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.
- Output kegiatan : Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
- Outcomes Kegiatan : Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.

10) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor, dilaksanakan untuk penyediaan jasa kebersihan pada Inspektorat Kota Cimahi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya pengawasan.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 56.336.000,00 (99,93%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 56.375.000,00 SDM 2 Orang, Waktu pelaksanaan 12 Bulan.

- Output kegiatan : Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
- Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.

11) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas, untuk pelaksanaan pemeliharaan rumah dan gedung Inspektorat Kota Cimahi guna mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur pengawasan.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 202.530.000,00 (99,97%) dan fisik 100%.
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 202.590.000,00 SDM 6 orang, Waktu pelaksanaan 12 bulan.
- Output kegiatan : Jumlah rumah dan gedung dinas.
- Outcomes Kegiatan : Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara.

b. Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Evaluasi LKIP, dilaksanakan untuk evaluasi LKIP Perangkat Daerah dan penyusunan LKIP Inspektorat Kota Cimahi.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 11.500.000,00 (100%) dan fisik 100 %
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp 11.500.000,00 SDM 30 orang, Waktu pelaksanaan 1 bulan.
- Output kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi
- Outcomes Kegiatan : Persentase Peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi LKIP PD.

2) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dilaksanakan untuk mereviu LKPD dan penyusunan LKPD Inspektorat Kota Cimahi.

- Capaian Target : Keuangan Rp. 5.500.000,- (100%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Input kegiatan : Dana Rp. 5.500.000,- SDM 30 orang, Waktu 3 bulan.
- Output kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang di reviu LKPD

- Outcomes Kegiatan : Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan PD yang direviu sesuai ketentuan.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemeriksaan Reguler, dilaksanakan untuk pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja fungsional (audit kinerja)
- Capaian Target : Keuangan Rp.16.162.500,- (99,77%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Keuangan Rp.16.200.000,- SDM 32 orang, Waktu 12 bulan
 - Output kegiatan : Jumlah PD yang di reviu
 - Outcomes Kegiatan : Persentase penurunan jumlah temuan.
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemeriksaan Tertentu, dilaksanakan untuk pemeriksaan lebih lanjut dari pemeriksaan internal.
- Capaian Target : Keuangan Rp.0 (0%) dan fisik 0%
 - Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
 - Input kegiatan : Keuangan Rp.1.500.000,- SDM 10 orang, Waktu 12 bulan.
 - Output kegiatan : Jumlah PD pemeriksaan tertentu
 - Outcomes Kegiatan : Persentase penurunan jumlah temuan.
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi, dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Maturitas SPTP, Pajak dan Retribusi, Hibah dan Bansos, Perizinan, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMIRB), Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan money lainnya.
- Capaian Target : Keuangan Rp.2.400.000,- (100%) dan fisik 100%
 - Lokasi Kegiatan : Cimahi
 - Input kegiatan : Jumlah Dana Rp.2.400.000,- SDM 32 orang, Waktu 12 bulan
 - Output kegiatan : Jumlah PD yang di monitoring dan evaluasi
 - Outcomes Kegiatan : Persentase penurunan jumlah temuan.

6) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pencegahan Korupsi Terintegrasi

- Capaian Target : Keuangan Rp.36.500.000,- (100%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Jumlah Dana Rp. 36.500.000,- SDM 10 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah PD yang melakukan rencana aksi (Renaksi KPK RI (8 dinas), RAD (5 Dinas), Hibah Bansos (3 Dinas), Reformasi Birokrasi (6 Dinas)
- Outcomes Kegiatan : Persentase PD pelayanan publik yang bebas korupsi.

7) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- Capaian Target : Keuangan Rp.1.073.100,- (89,43%) dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Jumlah Dana Rp.1.200.000,- SDM 32 orang, Waktu 2 bulan
- Output kegiatan : Jumlah monev PD yang mendapat bantuan provinsi Jawa Barat.
- Outcomes Kegiatan : Persentase penurunan jumlah temuan.

8) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

- Capaian Target : Keuangan Rp.109.295.000,- (100%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Jumlah Dana Rp.109.300.000,- SDM 40 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah PD yang mengimplementasikan renaksi saber pungli, sosialisasi, dan monev
- Outcomes Kegiatan : Persentase PD pelayanan publik yang bebas korupsi.

9) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Tindak Lanjut Hasil

Temuan (TLHP)

- Capaian Target : Keuangan Rp.4.995.000,- (99,90%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.5.000.000,- SDM 15 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.
- Outcomes Kegiatan : Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti.

10) Kegiatan Penyelenggaraan maturitas SPIP

- Capaian Target : Keuangan Rp.11.650.000,- (98,73%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.11.800.000,- ,SDM 15 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP
- Outcomes Kegiatan : Persentase peningkatan maturitas SPIP.

11) Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala Pranata Pengawasan

- Capaian Target : Keuangan Rp.4.000.000,- (100%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.4.000.000,- SDM 32 orang, Waktu 2 bulan
- Output kegiatan : Jumlah pranata pengawasan tahun 2019
- Outcomes Kegiatan : Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan.

12) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- Capaian Target : Keuangan Rp 226.270.000,- (99,69%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.226.980.000,- SDM 35 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Outcomes Kegiatan : Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi.

13) Kegiatan Keterampilan dan Profesionalisme

- Capaian Target : Keuangan Rp.2.800.000,- (100%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp 2.800.000,- SDM 32 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan substantif
- Outcomes Kegiatan : Persentase APIP yang memenuhi standar kompetensi.

c. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1) Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

- Capaian Target : Keuangan Rp.4.000.000,- (100%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.4.000.000,- SDM 12 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah dokumen anggaran, jumlah dokumen money, jumlah dokumen LPPD, jumlah dokumen LKIP, jumlah dokumen Renstra, jumlah dokumen Renja, jumlah SOP
- Outcomes Kegiatan : Persentase Laporan Tepat Waktu

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Inventaris Barang

- Capaian Target : Keuangan Rp.900.000,- (100%), dan fisik 100%
- Lokasi Kegiatan : Cimahi
- Input kegiatan : Keuangan Rp.900.000,- SDM 4 orang, Waktu 12 bulan
- Output kegiatan : Jumlah dokumen laporan inventaris barang, jumlah dokumen laporan keuangan
- Outcomes Kegiatan : Persentase Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil capaian rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan rekapitulasi capaian program dan kegiatan dari realisasi alokasi anggaran fisik dan keuangan pada Inspektorat Kota Cimahi tahun anggaran 2020, terdiri dari anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang dijelaskan pada tabel 2.2.

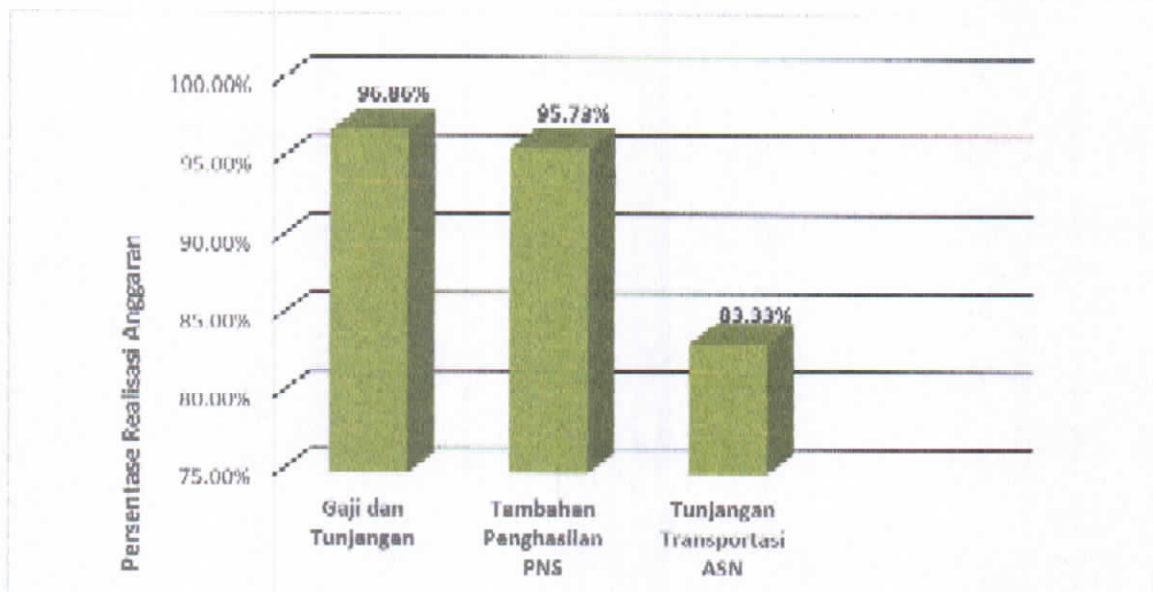
Tabel 2.2
Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
A	Belanja tidak langsung						
1	Gaji dan tunjangan	2.198.246.750	2.129.276.513	100	96,86	100	
2	Tambahan penghasilan PNS	3.878.124.998	3.712.800.000	100	95,73	100	
3	Tunjangan Transportasi ASN	180.000.000	150.000.000	100	83,33	100	
	JUMLAH	6.256.371.748	5.992.076.513	100	91,97	100	
B	Belanja langsung						
I	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.916.000	100	99,83	100	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000	30.345.504	100	91,96	100	
3	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	26.295.000	25.800.000	100	98,12	100	
4	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	96.440.000	76.961.100	100	79,80	99,92	
5	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	84.150.000	81.498.000	100	96,85	97,92	
6	Penyediaan gudang kantor	49.000.000	49.000.000	100	100	100	
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56.375.000	56.336.000	100	99,93	100	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
8	Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	22.800.000	22.435.644	100	98,40	100	
9	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	202.590.000	202.530.000	100	99,97	100	
10	Penyediaan makanan dan minuman	59.456.000	59.383.000	100	99,88	100	
11	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	44.122.045	44.109.045	100	99,97	100	
II	Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi						
12	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Evaluasi LKIP	11.500.000	11.500.000	100	100	100	
13	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Revisi LKPD	5.500.000	5.500.000	100	100	100	
14	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Pemeriksaan Reguler	16.200.000	16.162.500	100	99,77	100	
15	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Pemeriksaan Tertentu	1.500.000	0	100	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak ada disposisi Walikota untuk riksus
16	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	2.400.000	2.400.000	100	100	100	
17	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Pencegahan Korupsi Terintegrasi	36.500.000	36.500.000	100	100	100	
18	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Monev Baprov Jabar	1.200.000	1.073.100	100	89,43	100	

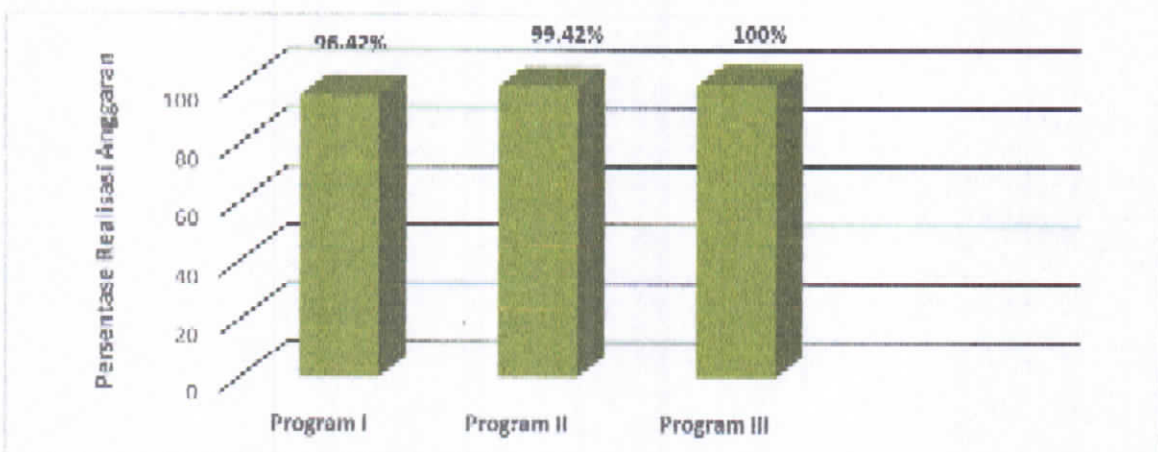
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
19	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Saber Pungli	109.300.000	109.295.000	100	99,99	100	
20	Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkala Tindak lanjut hasil pemeriksaan	5.000.000	4.995.000	100	99,90	100	
21	Penyelenggaraan Maturitas SPIP	11.800.000	11.650.000	100	98,73	100	
22	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	226.980.000	226.270.000	100	99,69	100	
23	Keterampilan dan profesionalisme	2.800.000	2.800.000	100	100	100	
24	Pengawasan Internal Secara Berkala Pradata Pengawasan	4.000.000	4.000.000	100	100	100	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
25	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100	100	100	
26	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	900.000	900.000	100	100	100	
	JUMLAH	1.163.808.045	1.135.359.893	97,55	98,08	100	
	JUMLAH BTL + BL	7.420.179.793	7.127.436.406	100	96,054	100	

Berdasarkan tabel 2.2 maka dapat diketahui persentase (%) realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 yang dijelaskan pada grafik 1 dan grafik 2.



Grafik 1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Cimahi tahun 2020

Dalam grafik 1 terdapat realisasi belanja tidak langsung pada anggaran gaji dan tunjangan sebesar 96,86%, terdapat anggaran sebesar 3,14 % yang tidak direalisasikan. Sedangkan pada tambahan penghasilan PNS sebesar 95,73% dan 4,27% tidak direalisasikan. Pada tahun 2020 ada Tunjangan Transportasi ASN yang tahun sebelumnya difasilitasi pada Belanja Langsung kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan realisasi anggaran 83,33%



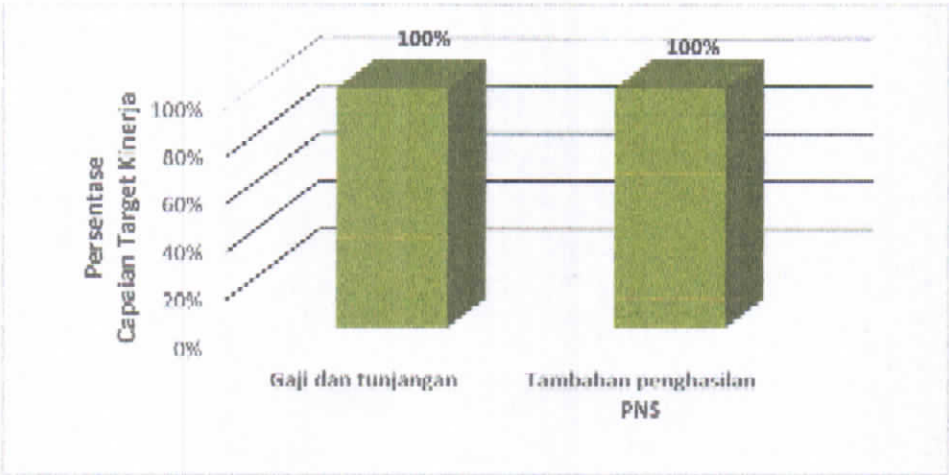
Grafik 2. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020

Keterangan :

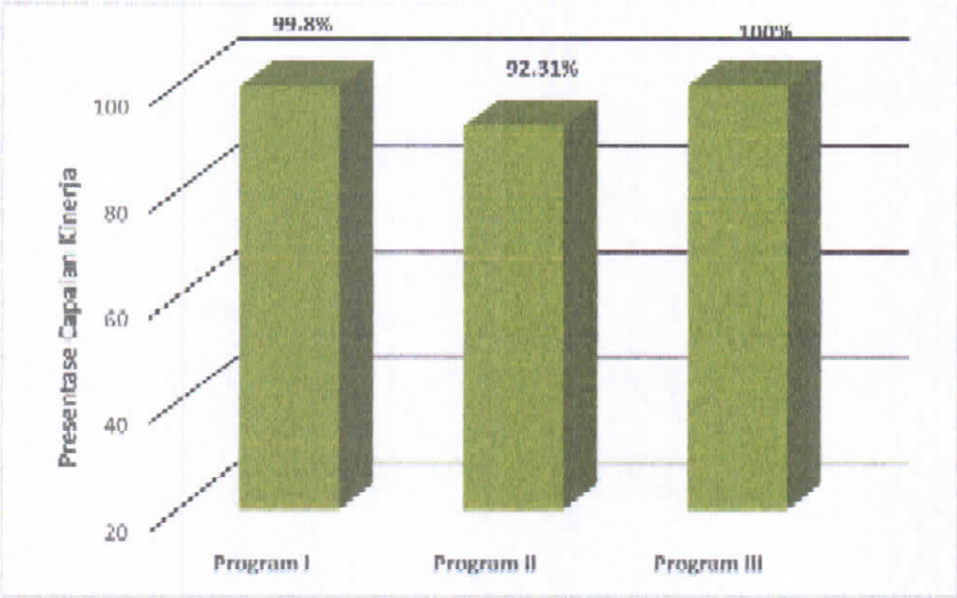
- I : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- II : Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi
- III : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Grafik 2 menunjukkan rata-rata persentase realisasi anggaran belanja langsung memenuhi target di atas 80%. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai persentase tertinggi sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran terendah pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu 96,42 % salah satunya BBM Uselon II tidak diserap sejak bulan Juli 2020 karena belum ada pejabat definitif.

Sedangkan untuk persentase (%) realisasi fisik program kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 dijelaskan pada grafik 3 dan grafik 4.



Grafik 3. Persentase Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Cimahi tahun 2020



Grafik 4. Persentase Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020

- Keterangan :
- I : Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - II : Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi
 - III : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Grafik 3 menunjukkan realisasi fisik sebesar 100% sesuai kebutuhan pegawai. Sedangkan grafik 4 yang menunjukkan persentase realisasi fisik tertinggi sebesar 100% pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Persentase capaian realisasi fisik terendah sebesar 92,31% adalah Program Perencanaan, Pengawasan, Evaluasi, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi karena tidak ada disposisi (mandatori) dari Wali Kota terkait kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pemriksaan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)

B. ANALISIS KINERJA

MONITORING DAN EVALUASI PENCANAAN AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TRIMULAN W PERUBAHAN TAHUN 2020
INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

SASAPAN STRATEGIS		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN			Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Urutan	Indikator Sasaran			Uraian	Indikator Program			Uraian	Indikator Kegiatan	Sasaran			
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi UKP kategori BB	71,43%	284%	Program Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemantauan Kegiatan dan Fasilitas	Persentase pelaksanaan nilai realisasi hasil evaluasi UKP Perangkat Daerah	14,75%	71,43%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berbasis Risiko Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi UKP	PD	25	100%	20 PD dari 28 PD yang dievaluasi UKP, memisahkan kategori A dan BB
Meningkatkan implementasi SPP	Misi Menulus SPP	1.258	42,27%	Program Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemantauan Kegiatan dan Fasilitas	Persentase pelaksanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program Perangkat Daerah yang di realisasikan dengan anggaran	78,57%	94,64%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berbasis Risiko RKA	Jumlah PC yang dievaluasi Laporan Keuangan	PD	25	100%	Telah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah subkegiatan PD Rencan RKA PD	PD	25	100%	Telah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah PC yang dievaluasi Rencan RKA PD	PD	3	0	Tidak dilaksanakan, masih dalam proses revisi Rencan RKA PD sesuai dengan kebutuhan baru
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah subkegiatan PC Rencan RKA PD	PD	55	100%	Telah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah PC yang dievaluasi RKA PD	PD	25	100%	Revisi RKA Perubahan TA 2020 dan RKA 2021
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah realisasi persentase anggaran	Kegiatan	2	100%	Dilakukan untuk periode tahun 3 dan penyerapan anggaran
								Sub Kegiatan Rencan RKA PD	Jumlah realisasi persentase anggaran	Kegiatan	1	50%	Dilakukan untuk periode tahun 3

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM		Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	KEGIATAN		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Uraian	Indikator Program		Uraian	Indikator Kegiatan			
Meningkatkan Implementasi SPIP	Nilai Mutuas SPIP	Program Peningkatan, Pengembangan, Evaluasi, Pemantauan, Kajian dan Fasilitas	Persentase pencapaian jumlah	42,27%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan Pemeliharaan Rutin	Jumlah PD objek pemeliharaan internal	90	100%	Terdapat 28 PD, jumlah temuan sebanyak 50 temuan dan 103 rekomendasi. Telah dilaksanakan Audit Kinerja 4 PD dan Cash Operasi 28 PD. Jumlah temuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena berbeda lingkup audinya. Akan dilakukan penyelesaian indikator program pada tahun 2021 agar lebih terukur. Jumlah total temuan untuk 50 PD sebanyak 83.
				82,7%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan Pemeliharaan Rutin	Jumlah PD objek pemeliharaan terkecil	25	100%	Terdapat 15 temuan, Audit BOS 12 Sekolah, Audit PSU 1 PD dan Audit Kepatuhan PBU 1 PD. Jumlah temuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak dilakukan pada tahun sebelumnya. Akan dilakukan penyelesaian indikator program pada tahun 2021 agar lebih terukur. Jumlah total temuan untuk 28 PD sebanyak 82.

SASARAN STRATEGIS		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEJARIAN			Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Urutan	Indikator Sasaran			Urutan	Indikator Program			Urutan	Indikator Kegiatan	Sasaran			
Meningkatkan Implementasi SPJ	Nilai Mutuas SPJ	1.266	42,27%	Program Pertumbuhan, Pengawasan, Evaluasi, Pemantauan Kegiatan dan Penilaian	Pelayanan dan Pengawasan Diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan	25%	100%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	Jumlah PD yang di monitor	PD	BE	116,07%	Telah dilaksanakan eval LPD terhadap Bagian Pemerintahan Serta, Monev pendataan bukar pajak serta Monev PFRG, Monev Covid-19, Monev SPJ, Monev Banskas UMN, Monev Rukh, Monev Penyerapan Anggaran, Monev DID, Jumlah temuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena berbeda jenis kegiatannya. Akan dilakukan penyesuaian indikator program pada tahun 2021 agar lebih akurat. Berdasarkan hasil monev tahun 2020, dengan jumlah total 65 PD, jumlah temuan sebanyak 204 temuan (tahun 2018 sebanyak 144 temuan untuk 43 PD)
								Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	Jumlah PD yang mendapat Banskas	PD	2	100%	Telah dilaksanakan terhadap 2 PD. Jumlah temuan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena berbeda jumlah auditan. Akan dilakukan penyesuaian indikator program pada tahun 2021 agar lebih akurat.
								Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	Jumlah temuan yang diarahkan ke bagian yang terkait dengan	Hasil	3	100,00%	Telah dilaksanakan penanganan 3 kasus pengaduan, karena refocusing anggaran maka tidak ada lagi kegiatan penanganan pengaduan. Jumlah temuan sebanyak 5 temuan.
Meningkatkan Implementasi SPJ	Nilai Mutuas SPJ	1.266	42,27%	Program Pertumbuhan, Pengawasan, Evaluasi, Pemantauan Kegiatan dan Penilaian	Pelayanan dan Pengawasan Diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan	25%	100%	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	Jumlah temuan yang diarahkan ke bagian yang terkait dengan	Hasil	3	100,00%	Telah dilaksanakan penanganan 3 kasus pengaduan, karena refocusing anggaran maka tidak ada lagi kegiatan penanganan pengaduan. Jumlah temuan sebanyak 5 temuan.
								Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Monitoring dan Evaluasi	Jumlah temuan yang diarahkan ke bagian yang terkait dengan	Hasil	3	100,00%	Telah dilaksanakan penanganan 3 kasus pengaduan, karena refocusing anggaran maka tidak ada lagi kegiatan penanganan pengaduan. Jumlah temuan sebanyak 5 temuan.

SASARAN/STRATEGIS		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN			Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan	CATATAN/ ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran			Uraian	Indikator Program			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan			
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi koordinasi dan konsultasi yang efektif	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi koordinasi dan konsultasi yang efektif	0%	0%	Pembelajaran Wartas SPD	Jumlah PD yang mengimplementasikan SPH	PD	100%	Tidak dilaksanakan evaluasi karena masih proses QA di BPKP, tetapi telah dilaksanakan pencampuran penyusunan Profil Risiko pada 23 PD
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	25%	100%	Ketampilan dan Profesionalisme	Jumlah pelatihan dan pelatihan substantif yang diikuti	Jumlah log diblat	100.00%	Telah dilaksanakan penngkahan kinerja pegawai melalui pembinaan jermari
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	100.3%	100.3%	Sua Kegiatan Perawatan Dinas Caraka	Jumlah perijinan dinas	Kali	230%	Telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang telah direalisasi
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	100%	100%	Pengadaan Mewah dan Murni	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	100%	Telah dilaksanakan 11 bulan penyediaan makan dengan jumlah anggaran yang telah direalisasi
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	100%	100%	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rumah dan gedung dinas	Unit	100%	Telah dilaksanakan 12 bulan pemeliharaan kendaraan
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	100%	100%	Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	Jumlah dan perawatan kantor	bulan	100%	Telah dilaksanakan perawatan ATK untuk 1 tahun, telah disediakan material di lokasi dan setiap 3 bulan
Terdapatnya pelayanan dan pembinaan di sarana-sarana yang efektif, efisien dan ekonomis	Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	75%	75%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Partisipasi sarana dan desaswara yang dipelihara	100%	100%	Pemeliharaan dan Perawatan Kantor	Jumlah bulan perawatan ATK	bulan	100%	Telah dilaksanakan perawatan ATK untuk 1 tahun, telah disediakan material di lokasi dan setiap 3 bulan

SASARAN STRATEGIS		Realisasi	Capaian Kinerja Tercapai Indikator Sasaran	PROGRAM		Realisasi	Capaian Kinerja Tercapai Indikator Program	KEGIATAN			Realisasi	Capaian Kinerja Tercapai Indikator Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran			Muatan	Indikator Program			Uraian	Indikator Kegiatan	Sasaran			
Tersedianya sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan catatan kinerja dan keuangan Inspektori Kota Cimahi yang akurat dan dapat	Persentase Laporan Tergakut Waktu	80%	90,0%	Program Penganggaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja secara Komprehensif	Persentase Laporan Tergakut Waktu	10%	100%	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja non PNS	Orang	120	100%	Telah dilaksanakan 12 bulan pembayaran jaminan kesehatan & ketenagakerjaan
								Penyediaan Jasa Koordinasi Ketenagakerjaan	Jumlah penyediaan jasa ketenagakerjaan	Orang	24	100%	Telah dilaksanakan 12 bulan penyediaan jasa ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Link dan Air	Jumlah bulan jasa komunikasi, jasa link dan jasa air	Bulan	12	100%	Telah dilaksanakan 12 bulan penyediaan jasa link dan jasa air
								Penyediaan Media Massa, Basing Cakupan dan Pengendalian	Jumlah bulan penyediaan media massa, jumlah bulan pengendalian	Bulan	6	100%	Rasionalisasi anggaran pada tahun II
								Penyusunan Anggaran Penghap Dearth					
				Program Penganggaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja secara Komprehensif	Persentase Laporan Tergakut Waktu			Sub Kegiatan : Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen anggaran	Dokumen	4	100%	Telah dilaksanakan penyusunan RKA 2021, RKAP dan DPPA 2020, DPPA 2021
								Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen moner pelaporan, dokumen LPD dan dokumen LPP	Jumlah dokumen moner, jumlah dokumen LPD, jumlah dokumen LPP	Dokumen	6	100%	Telah dilaksanakan moner tahun 1-4, penyusunan dokumen LPP dan LPPD
								Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen PERLA	Jumlah dokumen PERLA, jumlah dokumen PERLA	Dokumen	2	100%	Telah disusun draft revisi rencana dan draft kerja tahun 2021
								Sub Kegiatan : Penyusunan SOP	Jumlah SOP	Dokumen	1	100%	Telah disusun draft peckman pengawasan dan draft SOP
								Penyusunan Laporan Inventaris Barang					
	Persentase Realisasi Anggaran	50%	50%	Program Penganggaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja secara Komprehensif	Persentase Realisasi Anggaran	50%	100%	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	Dokumen	2	100%	Telah disusun draft laporan stock opname semester 1
								Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	2	100%	Telah disusun draft laporan keuangan semester 1 dan bahan laporan keuangan akhir tahun

Dalam melakukan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020, maka dilakukan pengukuran kinerja melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan target kinerja dari masing - masing kegiatan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2020. Sehingga berdasarkan anggaran dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Perhitungan pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja
JUMLAH	$\frac{\sum \text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\sum \text{Rencana}} \times 100$	100 %	96,054%	127%

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal yaitu :

85 s/d 100	=	sangat berhasil
70 s/d < 85	=	berhasil
55 /d < 70	=	cukup berhasil
<55	=	kurang berhasil

Secara umum pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang berjumlah 26 (dua puluh enam) kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 diklasifikasikan mencapai capaian kinerja :

SANGAT BERHASIL

DENGAN NILAI CAPAIAN KINERJA SEBESAR : 127 %

Capaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi anggaran rata-rata sebesar 127%, sehingga terukur adanya efisien anggaran dengan capaian target kriteria sangat berhasil.

C. CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2012 -2017

Realisasi persentase capaian kinerja pada Renstra tahun ke-1 sampai dengan ke-5 atau Tahun Anggaran 2012 – 2017 mencapai 79,56%. Output atau kuantitas kinerja belum mencapai 100%.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat
Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 4 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
I	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah			
	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			
1	Pemeriksaan regular	200 LHP	193 LHP	98%
2	Pemeriksaan tertentu	40 LHP	0 LHP	0%
3	Monitoring dan Evaluasi	570 LHM	353 LHM	64%
4	Monitoring Banprov	50 LHM	55 LHM	110%
5	Reviu LKPD	5 LHR	5 LHR	100%
6	Reviu RKA	3 LHR	2 LHR	40%
7	Evaluasi LAKIP	200 LHE	201 LHE	101%
	Kegiatan penanganan kasus lingkungan pemerintah daerah			
8	Pemeriksaan Kasus /Khusus	70 LHP Kasus	46 LHP Kasus	61%
	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan			
9	Tindak Lanjut LHP	421 BA	430 BA	102%
	Kegiatan pranata			
10	PKPT	5 dok	5 dok	100%
11	Arah Kebijakan/Jakwas	5 dok	1 dok	20%
12	Kode Etik	5 dok	1 dok	20%
13	Standar Audit	1 dok	3 dok	33%
14	POP	1 dok	3 dok	33%
15	Internal Audit Charter	1 dok	2 dok	50%
16	Pemetaan Profil SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
17	Tes Diagnostik SPIP Kota Cimahi	0	0	0%
	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			
18	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan/ Gelar Pengawasan	10 kali	10 kali	100%
II	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
	Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
19	PKS	155 orang	198 orang	128%
20	Diklat substantif pengawasan	25 orang	66 orang	264%
21	Diklat JFA	90 orang	5 orang	6%
22	Sosialisasi UU Pengawasan	60 orang	0	0%

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
III	Program pelayanan administrasi perkantoran			
23	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	60 bulan	60 bulan	100%
24	Telepon, air dan Listrik	60 bulan	60 bulan	100%
25	Asuransi kendaraan bermotor	90 unit	89 unit	99%
26	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	90 unit	89 unit	99%
27	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	60 bulan	100%
28	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 bulan	60 bulan	100%
29	Alat tulis Kantor	60 bulan	60 bulan	100%
30	Barang Cetakan dan Penggunduan	60 bulan	60 bulan	100%
31	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	100%
32	Bahan Pokok/Natura	60 bulan	60 bulan	100%
33	Makanan dan minuman rapat dan tamu	60 bulan	60 bulan	100%
34	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	60 bulan	60 bulan	100%
IV	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
35	Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
36	BBM dan Pelumas kendaraan	90 unit	89 unit	99%
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya			
37	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	300 orang	365 orang	122%
38	Pembinaan Pegawai	155 orang	157 orang	101,3%
39	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0%
VI	Program peningkatan disiplin aparatur			
40	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	250 stel	70 stel	28%
41	pengadaan pakaian KORPRI	155 stel	30 stel	19%
42	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	155 stel	65 stel	42%
VII	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD			
43	Laporan Triwulan ,LAKIP, LKPI, LKPD	35 laporan	37 laporan	106%

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
	Kegiatan penyusunan laporan semesteran			
44	Menyusun Laporan Semesteran	10 laporan	18 laporan	180%

Selama 5 tahun terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai rata-rata target Renstra yaitu :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. Program pengawasan yang menjadi *core business* Inspektorat tidak mencapai target kinerja, hal ini terkendala dari keterbatasan jumlah pengawas (SDM) dan waktu pengawasan, serta terdapat kegiatan pengawasan yang bersifat tentatif sesuai kebutuhan seperti pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan kasus/khusus.
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Pada kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Substantif), karena disesuaikan dengan jumlah JFU yang akan meningkatkan jenjang fungsional.
3. Program pelayanan administrasi perkantoran. Terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan. Karena jumlah 18 unit kendaraan yang ada, terdapat 1 unit kendaraan roda dua yang mengalami rusak berat dan dalam proses penghapusan. Sehingga tidak dilakukan pemeliharaan, BBM, dan perizinan.

D. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal yang dihadapi Inspektorat Kota Cimahi, yaitu :

Isu-isu strategis internal :

1. Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan capaian kinerja atau aspek keuangan tertentu.
2. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap capaian kinerja yang rendah.
3. Kendala reviu dokumen perencanaan karena format dan sistematika penulisan dokumen laporan tidak seragam.
4. Temuan berulang (seperti keuangan untuk perjalanan dinas, narasumber, pengadaan barang dan jasa, adminitrasi pengelolaan barang daerah dll).
5. Penyelenggaraan pemeriksaan belum sesuai SOP atau Standar Audit.

6. Kompetensi SDM Inspektorat belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Penentuan Objek pemeriksaan belum berbasis risiko.
8. Kuantitas dan kualitas Auditor belum proporsional. Auditor yang ada berjumlah 17 orang dengan tingkat kompetensi yang berbeda-beda, sedangkan yang dibutuhkan 65 orang, tidak seimbang dengan jumlah dan wilayah entitas pemeriksaan.

Isu-isu strategis eksternal :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan bersih dari korupsi dan pungutan liar.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat Kota Cimahi melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
2. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan melalui penyelenggaraan bimtek dan diklat sesuai dengan kebutuhan secara berkala.
3. Menambah jumlah Auditor, berkoordinasi dengan BKPSDMD.
4. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
5. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* (QA)
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana aksi penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi dan pungutan liar.
7. Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko untuk melaksanakan pengawasan pada Perangkat Daerah yang berbasis risiko.
8. Mewujudkan Zona Integritas (ZI) dengan predikat WIK/WIRBM melalui reformasi birokrasi untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

A. TUJUAN

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2005-2025, yaitu memberikan arah bagi seluruh komponen otonomi daerah Kota Cimahi (pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Cimahi yang disepakati bersama sesuai dengan karakter kota dan ciri-ciri keunggulan kota yang menjadi harapan di masa depan untuk turut ambil bagian dalam pencapaian Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada tahun 2025.

Kota Cimahi memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI

Visi :

“ Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya”

Penjelasan :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan Visi dijabarkan dalam misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan Inspektorat Kota Cimahi pada Misi 2 yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi, maka Inspektorat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta sebagai penyelenggara tata kelola Pemerintahan Kota Cimahi yang baik, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa

kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang telah spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan implementasi SPIP

Tujuan dan sasaran Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2022, dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Inspektorat Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Cimahi				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Optimalnya tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB
2	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah salah satu pencapaian sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

1. Kebijakan

Strategi Inspektorat untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari *Kebijakan Operasional, Program dan Kegiatan*.

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan butusan dan petunjuk bagi segenap anggota organisasi Inspektorat Kota Cimahi untuk melangkah.

Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
- Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional, dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai *Counseling Partner*.
- Menyusun rencana dan tindakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
- Memfasilitasi partisipasi publik dalam keikutsertaannya untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cimahi.
- Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cimahi, baik dengan auditan maupun Aparat Pengawas Pemerintah yang lain.
- Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparatur pengawasan untuk meningkatkan keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*).
- Memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan aparatur pengawasan dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas aparatur.
- Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan produktif dengan meningkatkan pelayanan operasional pengawasan yang memadai dan mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan secara berkesinambungan.

Hubungan visi-misi-tujuan RPJMD-sasaran RPJMD-strategi RPJMD dijelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Visi – Misi – Tujuan RPJMD – Sasaran RPJMD – Strategi RPJMD
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya			
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Indikator Tujuan : Indeks reformasi birokrasi			
Sasaran RPJMD : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah			
Strategi RPJMD : Mengembangkan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko.	Meningkatkan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LKIP Perangkat Daerah yang berorientasi hasil dan SMART.
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
			Meningkatkan kualitas penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai Pedoman Anggaran.

	Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah	Meningkatkan metode dan sistem pengawasan berbasis 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif)	1. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dengan sistem terintegrasi. 2. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer.
	Meningkatkan implementasi SPIP	Peningkatan pengendalian risiko oleh Tim Satuan Pelugas (SATKIAS) Kota dan setiap Perangkat Daerah	1. Penyusunan risk register dan RTP Perangkat Daerah 2. Optimalisasi kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan maturitas SPIP
Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawasan	Meningkatkan kapabilitas APIP	Peningkatan kompetensi APIP	Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP dengan melakukan inventarisasi data APIP, diklat, buntek, telaah seawat dan lainnya
	Meningkatkan koordinasi, sinergitas serta kualitas pelaksanaan pengawasan	Menyusun Kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Praotat Pengawasan	Penyediaan Praotat hukum yang memadai bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi
Meningkatkan kinerja organisasi Inspektorat melalui tata kelola administrasi, operasional, dan sistem pengendalian pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran	Penyediaan kebutuhan bagi operasional manajemen dan pelaksanaan pengawasan	Mewujudkan kondisi kerja yang kondusif dan produktif dengan meningkatkan pelayanan operasional pengawasan yang memadai
	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan sarana prasarana kerja yang representatif	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana prasarana kerja yang representatif	pengadaan peralatan dan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan pengembangan kinerja organisasi
	Terpeliharanya peralatan kerja dan sarana prasarana kerja secara ekonomis, efisien, dan efektif	Peningkatan kondisi peralatan kerja dan sarana prasarana kerja	Pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana prasarana kerja
	Meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan kualitas sumberdaya seluruh aparatur inspektorat	Peningkatan motivasi, kedisiplinan, etos kerja, tim kerja, kapasitas bagi seluruh pegawai inspektorat
	Tersedianya sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Implementasi sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Kota Cimahi yang akuntabel	Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai alat bagi sistem pengendalian internal pemerintah

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Inspektorat Kota Cimahi memiliki 3 program 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA

Urutan mengenai Prioritas Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 meliputi : Prioritas Pembangunan Kota Cimahi dan Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi, yang kajiannya dikaitkan dengan kebijakan dan keadaan Kota Cimahi secara umum.

1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA CIMAH TAHUN 2021

Mengingat telah berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Cimahi tahun 2007-2012, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kota Cimahi tahun 2021 yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Cimahi dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 juga akan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis, dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh PD serta berbugui pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya

Isu strategis pembangunan Kota Cimahi tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Mempercepat Pemulihan Sosial dan Ekonomi akibat pandemi Covid 19.
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
- c. Antisipasi tingginya pertumbuhan penduduk.
- d. Meningkatkan daya beli masyarakat dan antisipasi tingginya kemiskinan serta pengangguran.
- e. Mengoptimalkan layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah.
- f. Mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.

2. PROGRAM KERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

Mengimplementasikan Misi 2 Wali Kota Cimahi, dengan kebijakan-kebijakan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, bahwa Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang mengampu :

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Cimahi			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2	3	4	5
Optimalnya tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP

Selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2019-2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka dioperasionalkan dalam serangkaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung program prioritas kota yaitu :

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Sub Kegiatan
	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	c. Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan
	d. Reviu Laporan Keuangan
	e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan HPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Sub Kegiatan
	a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Sub Kegiatan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
	Sub Kegiatan

	a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Pengadaan Mebel
	b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	b. Pemeliharaan Mebel
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN RENCANA

Rencana anggaran kegiatan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.272.016.907,00. Uraian indikasi beserta rencana anggaran seluruh kegiatan pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| a. | Sub Kegiatan | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja Program | : | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan |
| | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun |
| | Kelompok sasaran | : | APIP |
| | Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| | Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 23.000.000,00 |
| | Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |
| b. | Sub Kegiatan | : | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja Program | : | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
| | Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan |
| | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun |
| | Kelompok sasaran | : | APIP |
| | Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| | Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 10.025.000,00 |
| | Sumber dana | : | APBD Kota Cimahi |

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| a. | Sub Kegiatan | : | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | Indikator Kinerja Program | : | Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan |
| | Indikator Kinerja Kegiatan | : | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu |
| | Indikator Kinerja Sub Kegiatan | : | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan |
| | Kelompok sasaran | : | APIP |
| | Lokasi Kegiatan | : | Kota Cimahi |
| | Kebutuhan dana Indikatif | : | Rp. 7.395.623.407,00 |

- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 6.600.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 3.525.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
- Indikator Kinerja Program : Persentase Peningkatan Kapasitas ASN
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 33.750.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	
	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja Program	: Persentase Peningkatan Kapasitas ASN
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 194.259.000,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah set peralatan dan perlengkapan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Terpenuhinya kebutuhan ATK, Benda Pos, dan Alat Kantor Rumah Tangga
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 77.205.400,00
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 64.665.400,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
c. Sub Kegiatan		
	:	Penyediaan Bahan Cetak Kantor dan Penggandaan
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 20.378.800,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
d. Sub Kegiatan		
	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah bulan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 77.147.000,00
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah set/unit BMD yang diadakan
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah set pengadaan mebel
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 5.162.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi
-
- b. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah set/unit BMD yang diadakan
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah unit gudang yang disewa
- Kelompok sasaran : APIP
- Lokasi Kegiatan : Kota Cimahi
- Kebutuhan dana Indikatif : Rp. 77.675.000,00
- Sumber dana : APBD Kota Cimahi

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Indikator Kinerja Program : Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang
- Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kelompok sasaran : APIP

	Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 40.800.000,00
	Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kelompok sasaran	:	APIP
	Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 204.077.900,00
	Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.	Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara
	Kelompok sasaran	:	APIP
	Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 124.720.000,00
	Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b.	Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Mebel
	Indikator Kinerja Program	:	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan

	Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah set/unit BMD yang dipelihara
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah set mebel yang dipelihara
	Kelompok sasaran	: APIP
	Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 5.875.000,00
	Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
c.	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah set/unit BMD yang dipelihara
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
	Kelompok sasaran	: APIP
	Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 93.750.000,00
	Sumber dana	: APBD Kota Cimahi
d.	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Indikator Kinerja Program	: Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah set/unit BMD yang dipelihara
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah gedung kantor yang dipelihara
	Kelompok sasaran	: APIP
	Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
	Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 102.675.000,00
	Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a.	Sub Kegiatan	: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Indikator Kinerja Program	: Nilai Hasil Pengawasan
	Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 38.350.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	:	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 29.350.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
c. Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Kinerja
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 44.800.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
d. Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Keuangan
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 58.500.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
e. Sub Kegiatan		
	:	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 95.250.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
f. Sub Kegiatan		
	:	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 42.150.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

g. Sub Kegiatan	: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Indikator Kinerja Program	: Nilai Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT
Kelompok sasaran	: Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 75.700.000,-
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

a. Sub Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Indikator Kinerja Program	: Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal.
Kelompok sasaran	: APIP
Lokasi Kegiatan	: Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	: Rp. 6.000.000,-
Sumber dana	: APBD Kota Cimahi

2) Pendampingan dan Asistensi

a. Sub Kegiatan	: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Indikator Kinerja Program	: Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah:

		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Kelompok sasaran	:	APIP
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 176.100.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi
b. Sub Kegiatan	:	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Indikator Kinerja Program	:	Level Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI
Kelompok sasaran	:	Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	:	Kota Cimahi
Kebutuhan dana Indikatif	:	Rp. 144.903.000,-
Sumber dana	:	APBD Kota Cimahi

BAB V

PENUTUP

Seiring dengan reformasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penataan organisasi pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi pengawasan pemerintah daerah menjadi salah satu obyek dalam proses tersebut. Salah satunya melalui pembagian kewenangan pengawasan dan penataan organisasi pengawasan internal di daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Inspektorat Kota Cimahi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.

Program Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 9.272.016.907,00 terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021 disusun, menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang selurus dengan target dan sasaran Perubahan Renstra serta sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2022.